

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan lebih dulu bermaksud untuk dijadikan pembanding dalam pengembangan penelitian yang baru, sehingga diharapkan peneliti memahami perspektif dari studi lain. Hasil penelitian terdahulu memiliki manfaat sebagai sumber kreativitas yang akan membantu peneliti selanjutnya dalam sebuah penelitian. Penelitian terdahulu akan memudahkan dalam menetapkan prosedur yang sistematis untuk Menyusun sebuah penelitian dari segi dan konsep. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti berhasil menemukan beberapa studi yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia, 2023), dengan judul “Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Pulau Sumatera”. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi data panel dengan menerapkan uji Chow dan uji Hausman guna menentukan model estimasi yang paling tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan cenderung negatif terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif. Sementara itu, variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan. Adapun variabel jumlah penduduk miskin serta tingkat pengangguran terbuka terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah Pulau Sumatera.

(Maknun, 2021) Penelitian yang berjudul “Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Gorontalo” menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Di sisi lain, persentase penduduk miskin menunjukkan pengaruh

negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi inklusif di wilayah tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Prawesti, 2023) dengan judul Analisis Investasi dan Peran Teknologi Informasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini yaitu variable investasi berpengaruh secara positif dan signifikan sementara variable teknologi informasi memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pembangunan ekonomi inklusif di Jawa Timur.

Penelitian oleh (Alfiyah & Badrudin, 2023) yang berjudul “Pengaruh Investasi Asing Langsung Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi”. Memperllihatkan hasil bahwa investasi asing langsung memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebaliknya investasi dalam negeri memberikan berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang berjudul (Raheem et al., 2018) “*Inclusive Growth, Human Capital Development and Natural Rent in SSA*” yang menggunakan metodologi panel dengan regresi berupa data tahunan dari 18 negara di SSA dan semua data yang bersumber dari World Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan maupun kesehatan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pembangunan negara Afrika Sub-Saharan. Namun, menambah pengeluaran kesehatan dengan sumber daya alam akan menjadi lebih signifikan dalam peningkatan pembangunan inklusif. Selain itu peningkatan pengeluaran pemerintah terutama di bidang kesehatan akan meningkatkan pembangunan PDB per kapita lebih dari 3,1% yang artinya efektif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anita & Udjianto, 2024) dengan judul “Determinants of Inclusive Economic Development: A Fixed Effect Model Approach” menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan model Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan uji parsial memiliki efek negatif dan signifikan. tingkat PDB hubungan signifikan dengan pembangunan ekonomi inklusif. Sementara itu, jumlah

penduduk miskin menunjukkan hubungan positif dan signifikan, indeks pembangunan manusia memiliki hubungan positif dan signifikan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan Ekonomi Inklusif

a. Definisi Pembangunan Ekonomi Inklusif

Menurut World Economic Forum (WEF), Ekonomi Inklusif merupakan upaya dalam peningkatan perputaran kinerja perekonomian dengan cara memperluas akses kepada masyarakat untuk menciptakan ekonomi yang makmur. Akan tetapi definisi menurut WEF ini tidak mudah diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal budaya dan kondisi sosial, serta factor seperti disparitas yang ada di Indonesia.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan dapat memberikan akses kesempatan yang luas bagi seluruh golongan masyarakat, serta dapat mengurangi ketimpangan yang ada diantara kelompok atau wilayah. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur pembangunan tidak hanya melalui pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi melalui beberapa aspek sosial ekonomi lainnya, sesuai dengan 21 indikator yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat mendorong arah pembangunan menjadi lebih inklusif (Mujahid Shaleh, 2021).

Salah satu cara untuk menilai apakah pembangunan ekonomi bersifat inklusif atau tidak adalah melalui Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Bappenas (2019), IPEI mencerminkan sejauh mana pembangunan di Indonesia memperhatikan unsur pertumbuhan ekonomi, tingkat ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut (Anita & Udjianto, 2024) angka Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif terdiri dari 3 pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator, yaitu:

Pilar I yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi terdiri dari 3 sub pilar yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi dengan 3 indikator; yaitu pertumbuhan PDRB riil per kapita, share sektor manufaktur terhadap PDRB, dan resiko kredit perbankan terhadap PDRB nominal. (2) Kesempatan kerja dengan 3 indikator, yaitu: tingkat kesempatan kerja, persentase penduduk bekerja dengan jam kerja ≥ 35 jam per minggu, dan persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas. (3) Infrastruktur ekonomi dengan 3 indikator, yaitu: persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN, persentase penduduk yang memiliki/menguasai telepon genggam, dan total jalan dengan kondisi baik dan sedang/luas wilayah.

Pilar II yaitu Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan, terdiri dari 2 sub pilar yaitu: (1) Ketimpangan dengan 3 indikator, yaitu : rasio gini, sumbangan pendapatan perempuan, dan rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota. (2) Kemiskinan dengan 2 indikator, yaitu: persentase penduduk miskin, rata-rata konsumsi protein per kapita per hari. 20

Pilar III yaitu Perluasan Akses dan Kesempatan, terdiri dari 3 sub pilar yaitu: (1) Kapabilitas manusia dengan 3 indikator, yaitu: harapan lama sekolah, persentase balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap, dan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. (2) Infrastruktur dasar dengan 2 indikator, yaitu: persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak, persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri. (3) Keuangan inklusif dengan 2 indikator, yaitu: rasio jumlah rekening DPK dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif, dan rasio jumlah rekening kredit perbankan UMKM terhadap rekening kredit secara keseluruhan.

b. Teori Pembangunan Ekonomi Inklusif

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan pembangunan ekonomi inklusif oleh beberapa ahli ekonom. Teori mengenai pembangunan ekonomi ini dikembangkan oleh beberapa ahli seperti berikut :

- 1) Teori Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada pemerataan hasil dan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi seluruh kelompok masyarakat. Konsep ini muncul sebagai kritik terhadap model pembangunan tradisional yang cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi namun tidak diikuti dengan distribusi hasil yang merata. Dalam pembangunan inklusif, tujuan utamanya bukan hanya peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga mencakup pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan, penciptaan kesempatan yang merata bagi semua pihak, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dari ancaman ekonomi. Sejalan dengan pandangan ini, Asian Development Bank (ADB, 2010) mendefinisikan pembangunan inklusif sebagai pertumbuhan yang menjamin kesetaraan dalam akses terhadap peluang ekonomi, sosial, dan politik untuk seluruh warga masyarakat.

2) Teori Kuznets

Teori pembangunan ekonomi inklusif dapat dikaitkan secara kritis dengan Teori Kuznets, sebuah teori yang dikemukakan oleh Simon Kuznets pada tahun 1955. Kuznets berargumen bahwa ketimpangan pendapatan dalam suatu negara akan meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi, namun seiring dengan waktu dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketimpangan tersebut akan berkurang. Kurva Kuznets berbentuk seperti huruf U terbalik (inverted U) yang berarti pada Tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung hanya dinikmati oleh kelompok tertentu (biasanya kota, sektor industri). Tahap lanjutan, distribusi pendapatan mulai membaik karena meluasnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.

2. Rata Lama Sekolah

a. Definisi Rata Lama Sekolah

Rata Lama Sekolah merupakan salah satu acuan yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk

usia 25 tahun ke atas di suatu daerah. Rata Lama Sekolah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kemajuan mutu seseorang untuk menjadi generasi penerus di masa yang akan datang . Seseorang diwajibkan menempuh Pendidikan tinggi dan wajib belajar selama 12 tahun supaya memiliki bekal untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Rata Lama Sekolah merupakan salah satu indikator yang menunjukkan cerminan potensi akses masyarakat terhadap pendidikan dan menjadi salah satu indikator dalam pembangunan sumber daya manusia. Dengan adanya harapan lama sekolah yang tinggi diharapkan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. pendidikan yang merata akan memberikan kesempatan yang setara bagi semua kelompok masyarakat.

Waktu diperlukan untuk dapat menyelesaikan pendidikannya setinggi mungkin agar dapat memaksimalkan keuntungan yang diharapkan, dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Investasi terhadap modal manusia dianggap lebih efektif dan menguntungkan apabila diperhitungkan berdasarkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dalam menjalani pendidikan yang hasilnya didapat setelah menamatkan proses pendidikannya, dan bersiap untuk mulai bekerja.

b. Hubungan Rata Lama Sekolah dengan Pembangunan inklusif

Selaras dengan sub-pilar pertama pada pembangunan ekonomi inklusif yaitu perluasan akses dan kesempatan kerja disebutkan bahwa kualitas modal manusia yang berkualitas menandakan adanya perluasan akses dan kesempatan kerja sehingga sumber daya manusia tersebut akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif.

Angka rata lama sekolah yang tinggi menunjukkan Tingkat Pendidikan di suatu daerah tersebut tinggi. Seseorang yang mempunyai kualitas pendidikan yang rendah akan cenderung sulit berkembang sehingga mengurangi kesempatan seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Tingkat rata lama sekolah yang rendah akan menyebabkan Tingkat kemiskinan tinggi yang nantinya akan menghambat pembangunan ekonomi inklusif. Pendidikan dengan jenjang dasar

dan menengah (SD, SMP, dan SMA) pada suatu daerah berpengaruh negatif terhadap pembangunan inklusif (Azwar & Saragih, 2018). Jadi, seseorang yang telah menempuh pendidikan menengah akan kesulitan terserap sebagai tenaga kerja yang dapat meningkatkan tingkat pengangguran.

c. Teori Pendidikan

Terdapat beberapa teori yang mengemukakan bahwa pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, salah satunya adalah Teori Modal Manusia. Teori ini menjelaskan bagaimana pendidikan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi. Beberapa tokoh yang dikenal sebagai pelopor teori modal manusia antara lain Gary Becker dari Universitas Chicago, yang meraih Nobel Ekonomi, serta Edward Denison dan Theodore Schultz, juga penerima Nobel Ekonomi, atas penelitian mereka terkait masalah ini. Para pendukung teori ini berargumen bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang diukur berdasarkan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Definisi Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merujuk pada individu yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, serta mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima kerja tetapi belum memulai pekerjaan tersebut. Definisi pengangguran dalam pengertian luas mencakup individu yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, serta mereka yang tidak aktif mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja namun belum memulai pekerjaan tersebut (Yuniar, 2021).

Pengangguran merupakan suatu kondisi seseorang sudah memasuki angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Seseorang yang tidak

bekerja dan secara tidak aktif mencari pekerjaan tergolong sebagai pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menunjukkan adanya masalah dalam perekonomian, seperti resesi atau kurangnya lapangan kerja. TPT sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan jumlah angkatan kerja. Hal ini dapat terjadi ketika jumlah lowongan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan.

b. Teori Pengangguran

1. Teori Klasik

Teori ekonomi klasik berpendapat bahwa masalah pengangguran dapat diatasi melalui mekanisme pasar, khususnya melalui penyesuaian pada sisi penawaran dan perubahan harga dalam sistem pasar bebas. Dalam pandangan ini, pengangguran dianggap sebagai kondisi sementara yang muncul akibat ketidaksesuaian alokasi sumber daya, yang pada akhirnya akan terkoreksi secara otomatis melalui mekanisme harga. Jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, maka upah akan cenderung menurun. Penurunan upah ini, menurut teori klasik, akan memicu penyesuaian dalam permintaan tenaga kerja sehingga pasar tenaga kerja kembali mencapai keseimbangan.

Namun, dalam praktiknya, penurunan upah yang terlalu drastis dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan menurunkan tingkat konsumsi, yang pada akhirnya justru dapat mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa serta menekan tingkat produksi perusahaan. Oleh karena itu, meskipun teori klasik menawarkan solusi berbasis pasar, pendekatan ini sering kali dikritik karena mengabaikan faktor rigiditas upah, kondisi sosial, dan kebijakan intervensi pemerintah yang dibutuhkan untuk mengatasi pengangguran secara lebih efektif.

c. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Pembangunan Inklusif

Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, di mana peningkatan tingkat pengangguran sering kali berakibat negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan pengangguran dapat mengurangi pendapatan seseorang sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang membutuhkan partisipasi seluruh Masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia, (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Indonesia.

4. Akses Internet

a. Definisi Akses Internet

Perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) merupakan akses yang mencakup seluruh perangkat dan fasilitas pendukung yang digunakan dalam layanan telekomunikasi, termasuk jaringan tetap seperti telekomunikasi public dan sirkuit sewa, serta jaringan yang bergerak seperti seluler, terrestrial, dan satelit (Badan Pusat Statistik, 2024). Internet sebagai salah satu komponen akses digital memiliki peranan penting dalam mempercepat efisiensi bisnis, memperluas akses pasar, dan mendukung perkembangan inovasi lintas sektor. Akses teknologi termasuk digitalisasi dan jaringan transportasi penting dalam pembangunan ekonomi membuka peluang baru sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi baru berbasis inovasi.

Pembangunan berkelanjutan mengenai akses telekomunikasi berpotensi besar dalam mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan sehingga memperluas akses pasar dan layanan. Perluasan akses internet dalam berbagai sektor seperti e-commerce dan fintech memperluas keterlibatan ekonomi secara menyeluruh dan menciptakan peluang bagi usaha kecil, menengah agar dapat bersaing dan berkontribusi dalam skala pasar internasional (Huda et al., 2024).

b. Hubungan Akses Internet dengan Pembangunan Inklusif

Akses internet memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan inklusif sebagai dasar utama dari transformasi digital yang mendukung aktivitas

ekonomi modern. Dengan akses internet yang merata diseluruh wilayah maka akan mempercepat produktivitas ekonomi, inovasi dan inklusi ekonomi. Dalam penelitian (HARSONO et al., 2024) menunjukkan bahwa akses telekomunikasi berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

c. Teori Akses Internet

1) Teori Pertumbuhan Endogen

Teori ini digagaskan oleh Paul Romer dan Robert Lucas (1990). Teori ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka berkelanjutan akan dipengaruhi oleh factor internal seperti teknologi, modal manusia, inovasi yang bukan hanya akumulasi modal fisik. Salah satu focus dari teori ini yaitu akses teknologi salah satunya yaitu internet. Internet memungkinkan akses yang meluas terhadap pengetahuan, pasar, layanan digital yang membuka peluang seluruh aktivis ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan.

5. Penanaman Modal Asing

a. Definisi Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut (Zahara & Octavia, 2020) Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan aktivitas penanaman modal yang dilaksanakan oleh investor asing untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia, baik secara keseluruhan menggunakann modal asing atau kerja sama atau joint venture dengan investor dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembangunan nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor riil. Melalui aliran investasi asing, tidak hanya terjadi transfer modal, tetapi juga transfer teknologi, pengetahuan manajerial, dan peningkatan efisiensi produksi. Dalam jangka panjang, kehadiran PMA diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan. Dengan demikian, PMA berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PMA merupakan bagian dari Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan terbuka bagi investor global dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Investasi asing di Indonesia bisa dikelola dalam investasi portfolio dan investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Kenaikan investasi langsung asing (PMA) memberi dampak lebih signifikan daripada investasi portfolio (Jamil & Hayati, 2020).

Aktivitas penanaman modal asing yang dimiliki investor asing dapat berasal dari entitas berbentuk badan hukum usaha, baik yang berstatus badan hukum Indonesia yang Sebagian atau seluruh sahamnya milik pihak asing. Selain itu modal asing juga dapat berasal dari perseorangan yang berstatus sebagai investor asing.

b. Teori Penanaman Modal Asing

1) Teori John Dunning

Menurut pandangan Dunning investor asing memiliki tiga ciri utama yang dimiliki investor asing Ketika melakukan investasi atau penanaman modal. Teori ini biasa disebut dengan *OLI Paradigm*, yaitu *Ownership Advantage*, atau keunggulan kepemilikan yang berarti Perusahaan memiliki asset atau keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. *Location Advantage* yaitu keunggulan lokasi atau geografis tertentu yang membuat investasi lebih menguntungkan dibandingkan memproduksi di negara asal. *Internalization Advantage* yaitu keunggulan internalisasi yang berarti kemampuan Perusahaan untuk mengelola langsung sehingga dapat menghindari berbagai risiko.

c. Hubungan Penanaman Modal Asing dengan Pembangunan Inklusif

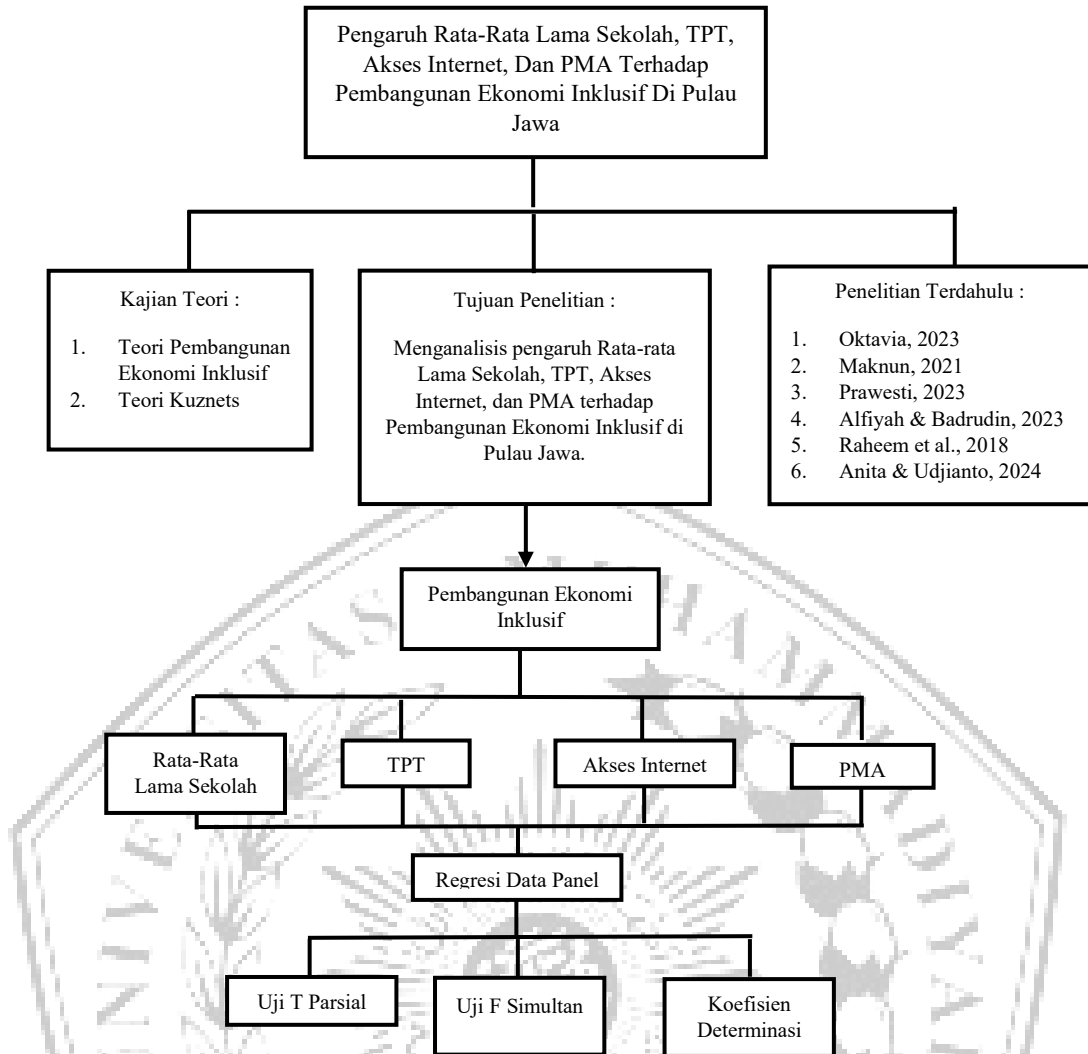
Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar guna membantu menurunkan Tingkat pengangguran yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi. Investasi asing berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak badan

usaha serta royalty yang dapat meningkatkan nilai PDB negara. Menurut (Prawesti, 2023) bahwa investasi asing langsung atau PMA memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Jawa Timur. Dalam penelitian (Alfiyah & Badrudin, 2023) juga disimpulkan bahwa investasi langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

C. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, dan landasan teoritis dijelaskan bahwa terdapat empat variabel bebas yaitu Rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Akses Internet, dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mempengaruhi variabel terikat yaitu Pembangunan Ekonomi Inklusif di Pulau Jawa. Keempat variabel tersebut dianalisis untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini:





D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Rata Lama Sekolah (X_1), Tingkat Pengangguran Terbuka (X_2), Akses Internet (X_3), Penanaman Modal Asing (X_4) terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Pulau Jawa.
2. H_1 : Terdapat pengaruh signifikan antara Rata Lama Sekolah (X_1), Tingkat Pengangguran Terbuka (X_2), Akses Internet (X_3), Penanaman Modal Asing (X_4) terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Pulau Jawa.